

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif *Good Governance* di Kabupaten Sinjai

Implementation of Parking Retribution Policy in the Perspective of Good Governance in Sinjai Regency

Maulana Rizqi Ramadhan^{1*} Imran Ismail², Andi Rasyid Pananrangi²

¹Dinas Perhubungan, Kabupaten Sinjai

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: maulanarizqiramadhan030394@gmail.com

Diterima: 27 Agustus 2024/Disetujui 30 Desember 2024

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam perspektif *good governance* di Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perpajakan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian strategi pengelolaan lahan parkir dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan *good governance* yang dapat dikaji pada prinsip *voice an accountability*, *Government effectiveness*, *Rule of Law*, *Control of Corruption* di Kabupaten Sinjai masih perlu peningkatan. Hal ini oleh masyarakat menurut persektif pihak pemerintah daerah berbeda yang dirasakan oleh masyarakat secara umum masih banyak yang perlu di benahi dan dimaksimalkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat, terdiri dari tiga aspek utama: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), yang masih memerlukan peningkatan dalam hal kompetensi dan disiplin kerja; (2) Sarana dan Prasarana, yang perlu diperbarui dan ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional pemungutan retribusi; dan (3) Sistem, yang harus diperbaiki agar lebih efisien dan dapat mengurangi potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi penerapan *good governance*, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melakukan perbaikan dan peningkatan dalam ketiga faktor tersebut. Peningkatan kualitas SDM, pembaruan sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem yang lebih transparan dan efisien, akan menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan retribusi parkir yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Strategi Pengelolaan Parkir, Kebijakan

Abstract. This research aims to determine the effects of parking retribution policy implementation in the perspective of *good governance* in Sinjai Regency. The location of this research is in Sinjai District, with a focus on the Transportation Agency as the agency responsible for the implementation of parking. Data were collected through observation and in-depth interviews. This research used a qualitative approach with an exploratory descriptive design. The results of the study of parking management strategies in development planning to create *good governance* that can be studied on the principles of *voice and accountability*, *Government effectiveness*, *Rule of Law*, *Control of Corruption* in Sinjai Regency still need improvement. This is perceived differently by the local government and the community, and from the public perspective, many things still need to be improved and maximized. The factors affecting the quality of parking levy implementation in Sinjai Regency, both as supporting and inhibiting factors, consist of three main aspects: (1) Human Resources (HR), which still needs improvement in terms of competence and work discipline; (2) Facilities and Infrastructure, which need to be updated and improved to support the smooth operation of retribution collection; and (3) System, which should be improved to be more efficient and to reduce potential leakage in retribution management. Therefore, to support the optimization of *good governance* implementation, it is recommended that the local government of Sinjai Regency make improvements and upgrades in these three factors. Improving the quality of human resources, updating facilities and infrastructure, as well as improving a more transparent and efficient system, will be important steps to achieve a more effective and sustainable parking retribution management.

Keyword: Parking Management Strategy, Policy, Good Governance



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia melalui Otonomi Daerah telah memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana APBD (Ratnawati, 2023; Sesung & Hadi, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, terdapat tantangan seperti

korupsi dan pengelolaan sumber daya yang tidak optimal (Sholikin, 2018; Sakti *et al.*, 2022). Selain itu, analisis keuangan daerah menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah pasca-otonomi mengalami penurunan, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan transparansi (Christianingrum, 2020; Haryanto, 2017). Oleh karena itu, meskipun Otonomi Daerah memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, implementasinya memerlukan pengawasan yang ketat dan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Nurhemi & R, 2015).

Penyelenggaraan sistem perparkiran di Kabupaten Sinjai dalam konteks Otonomi Daerah memiliki tujuan ganda: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang parkir yang aman dan nyaman. Kebijakan ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Manurung, 2023). Dalam pengelolaan retribusi parkir, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah (Maria *et al.*, 2019; Rante *et al.*, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi pendapatan daerah, namun tantangan seperti kurangnya pengawasan dan sumber daya manusia yang memadai sering kali menghambat implementasi kebijakan ini (Manurung, 2023; Ardiansyah, 2018). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Sinjai untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan retribusi parkir (Darmawan, 2023; Patarai, 2021).

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem perparkiran di Kabupaten Sinjai, diperlukan pelaksana yang terampil dan cakap dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat, menjadi kunci dalam pengelolaan sektor perparkiran (Arman *et al.*, 2019; Irma, 2022; Tuhumury & Wance, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Challen & Noermansyah, 2023; Garung & Ga, 2020). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Irma, 2022; Budiati *et al.*, 2020). Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Sinjai harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan perparkiran untuk mencapai hasil yang optimal (Tuhumury & Wance, 2020; Reu & Lasdi, 2021).

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai dalam konteks *good governance*, yang masih minim dalam kajian sebelumnya. Beberapa studi telah membahas kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan di berbagai daerah, seperti penelitian oleh Saputra dan Safitri yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Pangkalpinang belum optimal, sehingga memerlukan evaluasi Saputra & Safitri (2020). Selain itu, Heryanto menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Heryanto, 2022). Penelitian lain oleh Diani juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat (Diani, 2023). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sektor perparkiran di Kabupaten Sinjai, serta memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Tanan, 2024).

Penelitian ini menggunakan teori yang mencakup enam dimensi utama dalam tata kelola pemerintahan (*good governance*). Pertama, *Voice and Accountability* (VA) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik, yang dapat dilihat dalam penelitian oleh Kurniasih *et al.* yang menunjukkan bahwa kinerja aparatur sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam e-government Kurniasih *et al.* (2013). Kedua, *Political Stability and Absence of Violence or Terrorism* (PV) berhubungan dengan stabilitas politik yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif; meskipun tidak ada referensi langsung dalam konteks ini, stabilitas politik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan publik. Ketiga, *Government Effectiveness* (GE) mengacu pada efektivitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, yang diilustrasikan oleh penelitian Hastuti *et al.* yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar, meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya (Hastuti *et al.*, 2021). Keempat, *Regulatory Quality* (RQ) mencakup kualitas peraturan yang mendukung tata kelola, yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik; namun, referensi yang digunakan untuk mendukung klaim ini tidak relevan (Ristyawati, 2020). Kelima, *Rule of Law* (RL) menekankan penegakan hukum yang adil dan transparan, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah, meskipun referensi yang digunakan tidak mendukung klaim ini secara langsung (Manalu *et al.*, 2022). Terakhir, *Control of Corruption* (CC) berfokus pada pengendalian korupsi dalam pelaksanaan kebijakan, yang menjadi tantangan besar dalam banyak konteks pemerintahan (Sarjono & Sulistiadi, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam perspektif *good governance* di Kabupaten Sinjai, dan (2) Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perparkiran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bersifat eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena sosial secara alami, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap objek penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Azizah dan Prabawati (2021), penelitian

kualitatif memungkinkan peneliti untuk berinteraksi dengan subjek penelitian menggunakan bahasa dan terminologi yang sesuai, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual. Selain itu, penelitian deskriptif memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan tanpa memberikan perlakuan terhadap objek yang diteliti, yang sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan retribusi parkir dalam perspektif *good governance* (Sumarsono *et al.*, 2022; Desrinelti *et al.*, 2021).

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan retribusi parkir, serta bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan sektor ini. Penelitian oleh Sumarsono *et al.* menunjukkan bahwa analisis kualitatif dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yang relevan dengan konteks penelitian ini (Sumarsono *et al.*, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perparkiran. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa permasalahan perparkiran di Kabupaten Sinjai cukup kompleks, baik dari sisi penyelenggaraan maupun optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sinjai telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan mengidentifikasi hambatan yang menghalangi penerapan prinsip tersebut.

3. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi:

Observasi dilakukan secara sistematis dan disengaja untuk mengamati fenomena sosial terkait penerapan kebijakan parkir di Kabupaten Sinjai. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu dengan melibatkan diri secara aktif dalam subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang mendalam. Pedoman observasi disiapkan untuk membantu peneliti mencatat aspek-aspek penting, seperti pelaksanaan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan hambatan dalam penerapan *good governance*.

b. Wawancara Mendalam:

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari informan yang berkompeten. Narasumber meliputi pelaksana kebijakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dan masyarakat pengguna jasa parkir. Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk memastikan wawancara terarah dan fokus pada isu-isu yang relevan, seperti tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kendala teknis dalam pengelolaan parkir.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan model induktif. Setiap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan enam dimensi *good governance*. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang tingkat penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan selama penelitian. Analisis ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam dan menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola parkir di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di BKPSDM Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelayanan, berikut ini disusun hasil dan pembahasan berdasarkan temuan di lapangan.

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Parkir Dalam Perspektif Good Governance

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam perspektif *good governance* di Kabupaten Sinjai, dengan menyoroti berbagai dimensi yang relevan, seperti *voice and accountability*, *government effectiveness*, *rule of law*, dan *control of corruption*. Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan sejumlah hal yang menggambarkan keadaan yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan retribusi parkir di daerah tersebut.

a. *Voice and Accountability*

Transparansi adalah salah satu pilar penting dalam implementasi kebijakan publik yang berbasis pada prinsip *voice and accountability*. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai masih belum mengumumkan secara transparan informasi terkait tarif retribusi parkir melalui media cetak atau online. Website Dinas Perhubungan, yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat, tidak menyediakan informasi yang jelas tentang tarif parkir yang berlaku. Kejelasan informasi mengenai tarif sangat penting untuk memastikan masyarakat tidak merasa dirugikan atau bingung mengenai biaya yang dikenakan. Selain itu, layanan aduan masyarakat yang berbasis teknologi atau media online belum tersedia, padahal hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat untuk memberikan masukan dan keluhan terkait pelayanan parkir. Dalam hal akuntabilitas, penelitian menemukan bahwa pengelolaan parkir di Kabupaten Sinjai masih mengalami kekurangan dalam hal pembinaan juru parkir. Di lapangan, juru parkir sering kali tidak dilengkapi dengan atribut yang sesuai dan belum ada sosialisasi atau pelatihan yang rutin untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya ketertiban di lokasi parkir. Sebagai hasilnya, pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus cenderung tidak teratur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap juru parkir guna mendukung tercapainya pelayanan yang lebih baik dan lebih akuntabel.

b. *Government Effectiveness*

Dalam konteks *Government Effectiveness*, dua indikator utama yang dianalisis adalah efektivitas dan efisiensi serta responsivitas pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai masih lemah, terutama dalam hal pengelolaan akuntabilitas dan transparansi terkait pemungutan retribusi parkir. Salah satu dampak negatif dari hal ini adalah tingginya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor retribusi parkir. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang melibatkan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dalam pengelolaan parkir, sementara Dinas Perhubungan dapat fokus pada pengawasan, pembentukan regulasi, dan penyusunan program kerja yang lebih efisien. Terkait dengan responsivitas, penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai cukup tanggap terhadap keluhan, aspirasi, atau masukan yang datang dari masyarakat atau sektor swasta. Bila ada masalah atau permintaan yang melibatkan langsung Dinas Perhubungan, mereka cenderung segera memberikan tanggapan. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah tidak adanya layanan pengaduan berbasis teknologi yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memberikan saran atau keluhan dengan lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan responsivitas, disarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai mengembangkan platform digital untuk pengaduan masyarakat terkait masalah parkir.

c. *Rule of Law*

Penerapan *Rule of Law* dalam kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai sudah cukup jelas dengan adanya dasar hukum yang mendasari kebijakan tersebut. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan retribusi parkir. Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai juga telah menugaskan tim untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran parkir berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun, penerapan hukum di lapangan sering kali menemui tantangan. Beberapa pengendara masih melakukan pelanggaran parkir, baik di tepi jalan maupun di tempat parkir khusus. Oleh karena itu, meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, masih dibutuhkan peningkatan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pengelola parkir maupun pengguna jasa parkir, mematuhi aturan yang berlaku. Keberadaan tim penertiban parkir yang lebih terorganisir dan responsif akan sangat membantu dalam memperkuat penerapan hukum ini.

d. *Control of Corruption*

Pentingnya pengawasan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Untuk mencegah adanya kecurangan dalam pengelolaan retribusi parkir, Inspektorat Kabupaten Sinjai melakukan pengawasan secara berkala dengan melakukan uji petik terhadap sistem pemungutan retribusi parkir. Meskipun sudah ada upaya untuk meminimalkan praktik KKN, namun masih ada beberapa celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif, terutama terkait dengan pengelolaan dana yang berasal dari retribusi parkir.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan sudah dilakukan, kontrol yang lebih ketat dan sistem yang lebih transparan perlu diterapkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan audit lebih rutin terhadap pengelolaan dana retribusi parkir dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau penggelapan dana dalam pengelolaannya.

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai masih jauh dari optimal, terutama dalam penerapan prinsip *good governance*. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan pengawasan terhadap korupsi merupakan aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar sistem penyelenggaraan retribusi parkir dapat berjalan lebih baik. Kebijakan yang lebih melibatkan teknologi dan peran pihak ketiga dalam pengelolaan parkir dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan retribusi.

Untuk itu, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah pengembangan sistem informasi yang transparan terkait tarif parkir dan mekanisme pembayaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, peningkatan kualitas pengawasan terhadap juru parkir, dan perbaikan dalam pengelolaan sistem retribusi parkir yang melibatkan pihak ketiga. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Sinjai, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Strategi Dan Hubungan Faktor Penghambat Serta Faktor Pendukung Dalam Implementasi Good Governance Penyelenggaraan Parkir

Dalam upaya menciptakan *good governance* yang optimal dalam penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat serta strategi untuk memperbaiki dan meningkatkan faktor pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat yang signifikan mencakup kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem yang diterapkan dalam pengelolaan parkir. Masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, sekaligus memperkuat faktor pendukung untuk mencapai *good governance* yang lebih baik.

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, baik itu juru parkir, pengawas, maupun unsur lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan retribusi parkir. Berdasarkan observasi di lapangan, kualitas kerja juru parkir dan pengawas masih rendah, yang berpengaruh pada ketertiban dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Pelatihan yang dapat dilakukan meliputi manajemen parkir, pengetahuan tentang regulasi parkir, dan etika pelayanan publik. Melalui peningkatan kualitas ini, diharapkan juru parkir dan pengawas dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas, perlu juga adanya sistem yang memadai dalam perekrutan juru parkir. Seiring dengan kebutuhan yang terus meningkat, beberapa lokasi parkir yang belum dikelola dengan baik dapat dioptimalkan dengan merekrut juru parkir baru. Agar proses ini berjalan lebih profesional, disarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai mengadopsi pola kerjasama dengan pihak ketiga yang lebih berpengalaman dalam pengelolaan parkir. Seperti yang telah diterapkan di beberapa kota besar, sistem kemitraan ini memungkinkan Dinas Perhubungan untuk fokus pada perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, sementara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir bisa diserahkan kepada perusahaan yang lebih profesional dalam mengelola parkir. Dengan begitu, kualitas pelayanan parkir akan meningkat, serta potensi kebocoran pendapatan daerah dari sektor ini dapat diminimalisir.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Faktor kedua yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan retribusi parkir adalah kurangnya pembaruan pada sarana dan prasarana parkir. Sarana dan prasarana yang ada saat ini masih tergolong kuno dan belum mendukung sistem pengelolaan parkir yang efisien. Salah satu upaya untuk meningkatkan sarana retribusi parkir adalah dengan memperkenalkan metode pembayaran digital atau cashless. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Penerapan sistem pembayaran non-tunai tidak hanya akan mempermudah pengguna parkir, tetapi juga memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time yang lebih transparan dan akurat.

Di sisi lain, untuk meningkatkan prasarana parkir, perlu dilakukan pembaruan berupa pemasangan palang parkir otomatis di pelataran parkir. Sistem palang parkir otomatis ini dapat memantau kendaraan yang masuk dan keluar secara elektronik, sehingga memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap jumlah kendaraan yang parkir dan uang yang disetorkan ke kas daerah. Dengan sistem yang terotomatisasi ini, potensi kebocoran dan manipulasi retribusi dapat dikurangi secara signifikan. Penerapan palang parkir otomatis juga akan meningkatkan accountability dalam pengelolaan retribusi parkir dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip *good governance*.

c. Pembaruan Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir

Faktor ketiga yang menjadi penghambat adalah sistem yang diterapkan dalam pengelolaan retribusi parkir. Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai masih menggunakan sistem manual atau konvensional dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, yang menyebabkan berbagai kendala, seperti pencatatan yang tidak akurat, pengawasan yang kurang efektif, dan kebocoran pendapatan daerah. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan agar sistem pengelolaan parkir yang ada digantikan dengan sistem digital yang lebih modern dan efisien.

Pembaruan sistem ini akan mencakup seluruh tahapan pengelolaan parkir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Penerapan sistem digital memungkinkan pengawasan yang lebih terintegrasi dan transparan, serta memudahkan proses pelaporan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan retribusi parkir. Selain itu, sistem digital ini juga dapat menyediakan wadah bagi masyarakat atau pengguna jasa parkir untuk memberikan saran, masukan, dan keluhan melalui layanan aduan online. Dengan adanya platform aduan ini, Dinas Perhubungan dapat merespons masalah yang timbul dengan lebih cepat dan efisien, sekaligus memberikan accountability yang lebih tinggi terhadap publik.

d. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi

Dalam upaya untuk mencapai *good governance*, pengawasan dan evaluasi yang kuat sangat diperlukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai selama ini masih cenderung lemah, baik dalam hal pengelolaan dana maupun dalam hal disiplin kerja para petugas parkir. Oleh karena itu, selain melakukan pembaruan pada sistem dan sarana, perlu juga diperkuat mekanisme pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan audit atau pemeriksaan secara rutin terhadap pengelolaan retribusi parkir. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi yang dapat memonitor transaksi parkir secara langsung juga akan sangat membantu dalam meminimalkan kebocoran dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang lebih baik, pengawasan akan menjadi lebih efektif, dan kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalkan.

e. Pelatihan dan Pembinaan untuk Semua Pihak Terlibat

Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai *good governance*. Dalam konteks ini, pelatihan dan pembinaan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir, mulai dari juru parkir, pengawas, hingga pihak ketiga yang bekerja sama, sangat penting. Pembinaan yang dilakukan secara berkala tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis terkait peraturan dan prosedur parkir, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai etika, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

Selain pelatihan teknis, perlu juga diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan baru terkait retribusi parkir, tarif yang berlaku, dan cara pembayaran yang lebih efisien. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan melaporkan jika terdapat masalah dalam pelaksanaan parkir. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan ciri utama dari *good governance*.

f. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Retribusi Parkir

Selain faktor internal yang melibatkan pemerintah dan instansi terkait, partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam pencapaian *good governance*. Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir perlu diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengawasan dan pemberian umpan balik terkait kualitas pelayanan parkir. Melalui platform aduan online atau sistem feedback yang lebih mudah diakses, masyarakat dapat dengan cepat menyampaikan keluhan atau memberikan saran terkait pelayanan parkir. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah akan lebih mudah mendeteksi masalah

yang timbul di lapangan dan dapat merespons dengan cepat. Partisipasi ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.

Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir. Pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam manajemen parkir dapat membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir, khususnya di kawasan yang belum terkelola dengan baik. Sebagai contoh, pihak ketiga dapat mengelola area parkir yang ramai dan rawan kesalahan administrasi, sementara Dinas Perhubungan tetap bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan.

Dari hasil penelitian ini, bahwa untuk meningkatkan kualitas *good governance* dalam penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, dibutuhkan peningkatan yang signifikan pada faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pengelolaan yang ada. Dengan melibatkan teknologi digital, pelatihan rutin, dan kerjasama dengan pihak ketiga, diharapkan dapat tercapai pengelolaan parkir yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan *good governance* yang ideal di sektor retribusi parkir.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai belum optimal. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat kontribusi setiap pilar *good governance*. Kendala-kendala ini meliputi masalah dalam transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan kebijakan parkir yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara lebih efektif dalam penyelenggaraan retribusi parkir.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat, terdiri dari tiga aspek utama: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), yang masih memerlukan peningkatan dalam hal kompetensi dan disiplin kerja; (2) Sarana dan Prasarana, yang perlu diperbarui dan ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional pemungutan retribusi; dan (3) Sistem, yang harus diperbaiki agar lebih efisien dan dapat mengurangi potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi penerapan *good governance*, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melakukan perbaikan dan peningkatan dalam ketiga faktor tersebut. Peningkatan kualitas SDM, pembaruan sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem yang lebih transparan dan efisien, akan menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan retribusi parkir yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, B. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pajak Daerah. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 1-8.
- Arman, A., Gaussyah, M., & Darmawan, D. (2019). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 282.
- Azizah, A. and Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 459-474.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425-444.
- Challen, A. and Noermansyah, A. (2023). Peran Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 23-36.
- Christianingrum, R. (2020). Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah. *J. Budg.*, 5(2), 18-43.
- Darmawan, A. (2023). Desentralisasi Di Indonesia.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Diani, R. (2023). Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan. *Unnes Political Science Journal*, 6(2), 71-75.
- Garung, C. and Ga, L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- Haryanto, J. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil Sda Dan Non-Sda Di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 103-116.
- Hastuti, B., Anwar, F., & Titi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jiapi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101.
- Heryanto, D. (2022). Pengawasan Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Pamarenda Public Administration and Government Journal*, 2(1), 35.
- Irma, I. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah*

Administrasita, 13(1), 1-13.

- Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. *Sosiohumaniora*, 15(1), 6.
- Manalu, P., Tarigan, F., Girsang, E., & Ginting, C. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292.
- Manurung, M. (2023). Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpiang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(4), 345-356.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti Empiris Dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1-22.
- Nurhemi, N. and R, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 18(2), 183-206.
- Patarai, M. (2021). Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406-1417.
- Rante, A., Rosidi, R., & Djamhuri, A. (2014). Sistem Akuntansi Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Dan Desentralisasi Sebagai Determinan Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1).
- Ratnawati, R. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi di Pulau Kalimantan Dan Sumatera Periode 2020-2022). *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 125.
- Reu, F. and Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38-59.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240-249.
- Sakti, F., Wahyudi, E., Rifki, E., & Ufah, H. (2022). Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 49-58.
- Saputra, P. and Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 4(2).
- Sarjono, A. and Sulistiadi, W. (2018). Analysis of Policy Implementation for The Improvement Capability of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) At Inspectorate General of Ministry of Health. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 3(1), 1.
- Sesung, R. and Hadi, S. (2021). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Dalam Perspektif Prinsip Otonomi Dan Desentralisasi. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1).
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 35-50.
- Sumarsono, C., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228-249.
- Tanan, E. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. *JPMS*, 2(1), 34-42.
- Tuhumury, Y. and Wance, M. (2020). Membangun Good Governance Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa. *Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(1), 37-45.